

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Artikel/Jurnal

- Adibah, U., & Setyono, J. (2021). Evaluasi Kebijakan Perumahan pada Kawasan Perkotaan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro.
- Arbain, T., & Ariyani, E. (2019, November). Village Funds Mismanagement in Policy Evaluation Perspective in Jejangkit Pasar Village of South Kalimantan. In Iapa Proceedings Conference (pp. 427-447).
- Aslinda, A., & Ibrahim, M. (2018). MODEL KEBIJAKAN PUBLIK DAN TEORI PERUBAHAN KEBIJAKAN.
- Asmara, Q. (2009). Evaluasi implementasi kebijakan penyediaan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai energi alternatif (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
- Brady, S. R. (2015). Utilizing and adapting the Delphi method for use in qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, 14(5), 1609406915621381.
- Buck, A. J., Gross, M., Hakim, S., & Weinblatt, J. (1993). Using the Delphi process to analyze social policy implementation: A post hoc case from vocational rehabilitation. *Policy Sciences*, 26(4), 271-288.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua), terj. Samodra Wibawa, dkk, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 2-3.
- Global Sustainable Tourism Council (GSTC). (2016). Kriteria Industri GSTC dengan Indikator Kinerja yang Disarankan untuk Hotel dan Akomodasi.
- Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif.
- ISWAHYUDI, M. (2017). Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping) dalam Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang

Pengendalian Pembangunan Hotel (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Katrunida, D. (2017). Strategi Pengembangan Sentra Pedagang Kaki Lima Dan Taman Bermain Sebagai Ruang Publik Menurut Persepsi Stakeholder di Sepanjang Koridor Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Malang).

MANIK, M. S. (2018). KEGAGALAN KEBIJAKAN: STUDI KASUS MORATORIUM HOTEL DI YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)

McGeoch, M., Brunetto, Y., & Brown, K. (2014). The policy delphi method: contribution to policy and strategy within energy organisations: a 2013 Malaysian case study with global implications. *Quality & Quantity*, 48(6), 3195-3208.

Muljanto, M. A. (2015). Mengenal Kebijakan Publik. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Rayens, M. K., & Hahn, E. J. (2000). Building consensus using the policy Delphi method. *Policy, politics, & nursing practice*, 1(4), 308-315.

Saleh, S. (2017). Analisis data kualitatif.

Silitonga, D. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik (Vol. 1). Zahira Media Publisher.

Situmorang, C. (2016). Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kerja).

Subarsono, A. G. (2012). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi

Ulumuddin, I. A., & Darwin, M. M. (2021). Ambiguitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman Terhadap Moratorium Izin Usaha Hotel, Apartemen dan Kondotel. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(1), 67-85.

Referensi dari Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.
53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis
Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Walikota No 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan hotel di Kota
Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan
Hotel

Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan
Hotel

Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Referensi dari Media Internet

Atmasari, N. (2014, 14 Januari). 106 Hotel Berpotensi Tumbuh di Kota Jogja. Diakses
pada 4 Oktober 2022, dari
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2014/01/14/510/481730/106-hotel-berpotensi-tumbuh-di-kota-jogja>

Hadi, U. (2019, 3 Januari). Pencabutan Moratorium Izin Hotel di Yogya Dikecam
Kalangan DPRD. Diakses pada 5 Oktober 2022, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4369576/pencabutan-moratoriun-izin-hotel-di-yogya-dikecam-kalangan-dprd>

Kusuma, W. (2019, 2 Januari). Pemkot Yogyakarta Cabut Moratorium Pembangunan
Hotel Secara Terbatas. Diakses pada 5 Oktober 2022, dari
<https://regional.kompas.com/read/2019/01/02/23534541/pemkot-yogyakarta-cabut-moratorium-pembangunan-hotel-secara-terbatas?page=all>

Wicaksono, P. (2022, 14 Juni). Kasus Dugaan Korupsi Haryadi Suyuti Mempengaruhi Investasi Pariwisata Yogyakarta. Diakses pada 14 Juli 2023, dari <https://travel.tempo.co/read/1601823/kasus-dugaan-korupsi-haryadi-suyuti-mempengaruhi-investasi-pariwisata-yogyakarta>

Referensi dari Website Pemerintah

Badan Otorita Borobudur. (2019, 3 Januari). Moratorium Hotel Dicabut. Diakses pada 5 Oktober 2022, dari <https://bob.kemenparekraf.go.id/en/1336-moratorium-hotel-dicabut/>

Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Statistik Ketenagakerjaan*. Diakses pada 29 September 2022, dari http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/263-statistik-ketenagakerjaan

Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Statistik Kepariwisata 2020*. Yogyakarta

Dinas Pariwisata Yogyakarta. (2020). Perkembangan Total Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta 2020. Diakses pada 26 September 2022, dari <https://pariwisata.jogjakota.go.id/>

Ombudsman DIY. (2019). Pencabutan Moratorium Pembangunan Hotel Bintang 4&5 di Jogja Dipersoalkan Ombudsman. Diakses pada 5 Oktober 2022, dari <https://ombudsman.jogjaprov.go.id/pencabutan-moratorium-pembangunan-hotel-bintang-4-5-di-jogja-dipersoalkan-ombudsman/>

Open Data Jogja Kota. (2021). *Data Realisasi Pajak Daerah*. Diakses pada 29 September 2022, dari https://opendata.jogjakota.go.id/data/pajak/pad_tahun_noseries